



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GDE EKA BUDHIYADNYA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 110621

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.551.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/245 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 184 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 301.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 642 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.709.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA NEW REBORN MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ-TRD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000



5. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
182.000.000
6. MOBIL, TOYOTA ALPARD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
717.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 101.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 210.666.603

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.573.366.603

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.573.366.603

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.